

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor unggulan dalam perekonomian daerah menjadi salah satu faktor utama dalam pertimbangan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah harus berpartisipasi dengan masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya agar merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam

upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara berama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Pembangunan nasional yang diarahkan pada pembangunan daerah, berdasarkan UU 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana peran serta pemerintah dan masyarakat sangat penting sekali dalam pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu. Sehingga upaya pemerataan pembangunan diseluruh tanah air mulai dari daerah maju, berkembang dan terpencil perlu untuk ditingkatkan demi tercapainya pembangunan ekonomi secara nasional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka daerah akan berusaha mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai keunggulan daerahnya. Keunggulan dari sektor ekonomi daerah ini diprioritaskan dan dikembangkan, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau ekspor yang tinggi yang akan berdampak bagi peningkatan perekonomian daerah tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila biaya produksi rendah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Daya saing suatu daerah dapat diketahui melalui proses pembangunan antar daerah (antar regional) maupun internasional, sehingga dalam jangka panjang sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing akan menjadi spesialisasi dan andalan daerah. Selain itu pembangunan tidak dapat mengabaikan pertumbuhan ekonomi, oleh karena pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan sebagai suatu proses yang menggambarkan adanya pembangunan baik meliputi proses pertumbuhan ataupun perubahan dalam kehidupan bersama sosial dan budaya (Sajogyo, 1985:14) dan pembangunan sebagai perubahan spontan dan terputus-putus dalam keadaan stasioner yang senantiasa mengubah dan mengamati kesinambungan yang ada sebelumnya. Dalam konteks pembangunan menyatakan bahwa kebijaksanaan pemerintah ditunjuk untuk mengubah cara berpikir, selalu memikirkan perlunya investasi pembangunan. Dengan adanya pembangunan akan terjadilah nilai-nilai budaya bangsa, yaitu terciptanya taraf hidup yang lebih baik (Rahardjo, 2005:28).

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Pada pembangunan ekonomi di daerah, tujuan pembangunan itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan pembangunan nasional. Akan tetapi, proses pembangunan di daerah jauh lebih spesifik (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan, bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam Hal ini berarti terdapatnya kenaikan dalam pendapatan nasional yang ditunjukkan oleh besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berikut adalah tabel laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kupang

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Kupang 2016–2020

No	Tahun	Pertumbuhan (%)
1	2016	6,56
2	2017	4,81
3	2018	5,19
4	2019	3,71
5	2020	3,64

*Sumber : BPS Provinsi NTT, PDRB Kabupaten Kupang
Tahun 2016-2020*

Berdasarkan tabel 1.1, selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kupang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 6,56% pada tahun 2017 turun menjadi 4,81% dan pada tahun 2018 kemudian naik menjadi 5,19% pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 3,71% dan pada tahun 2020 kembali lagi menurun sebesar 3,64%. Dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kupang dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan atau tidak stabil.

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi daerah dapat diukur dengan beberapa indikator yang lazim digunakan sebagai alat ukur. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bisa menjadi petunjuk kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Syafriзал, 2008). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah seluruh produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah domestik Kabupaten Kupang.

PDRB Kabupaten Kupang disajikan menurut dua versi yaitu PDRB harga berlaku dan PDRB harga konstan. Dari data PDRB yang disajikan tersebut dapat diketahui besarnya nilai tambah sektoral. Selain itu dari data PDRB dapat diketahui

peran/andil masing-masing sektor dalam perekonomian Kabupaten Kupang, juga dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi baik wilayah maupun sektor, juga dari data PDRB tersebut dapat diketahui inflasi setiap sektor dan menyajikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kupang. Pemanfaatan data PDRB ini sangat luas terutama sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan dan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan ekonomi regional. PDRB Kabupaten Kupang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori/sektor lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Gambaran untuk setiap kategori lapangan usaha akan diuraikan lebih jauh pada masing-masing sub bagian. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Kupang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha dari tahun 2016-20120.

Tabel 1.2
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan (Persen) Usaha,2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018 r)	2019*)	2020**)
1	Pertanian, kehutanan & perikanan	40,53	40,32	40,03	39,27	40,45
2	Pertambangan & Penggalian	2,11	2,15	2,11	2,31	1,89
3	Industri Pengolahan	1,95	1,93	1,93	1,90	1,84
4	Pengadaan Listrik & Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah & Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6	Konstruksi	12,86	12,77	12,99	13,70	12,66
7	Perdagangan Besar & Eceran,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,84	14,26	14,44	14,70	13,89
8	Transportasi & Pergudangan	5,98	6,09	6,11	6,05	5,95
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
10	Informasi & Komunikasi	5,16	5,11	5,08	5,03	5,69
11	Jasa Keuangan & Asuransi	0,75	0,74	0,72	0,71	0,75
12	Real Estat	1,65	1,66	1,65	1,56	1,56
12	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
14	Administrasi Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	10,37	10,21	10,22	10,10	10,60
15	Jasa Pendidikan	5,53	3,48	3,43	3,37	3,43
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0,83	0,83	0,85	0,86	0,89
17	Jasa Lainnya	0,16	0,16	0,17	0,17	0,14
18	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Bps Provinsi NTT, PDRB Kabupaten Kupang Tahun 2016-2020
 Keterangan -* : Angka Sementara ** : Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel distribusi presentase Kabupaten Kupang sektor yang memberikan peran terbesar adalah sektor pertanian,kehutanan,perikanan 40,45% dan Perdagangan Besar dan Eceran,reprasi,Mobil dan Sepeda Motor 13,89% dan Kontruksi 12,66%.Sementara sektor yang memberikan sumbangsih terkecil adalah sektor pengadaan listrik dan gas 0,03% dan sektor jasa perusahaan 0,03% terhadap Nilai total PDRB di Kabupaten Kupang.

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi diharapkan agar masing-masing daerah mampu berusaha sendiri untuk meningkatkan pendapatannya, maka penggalan dan penggunaan potensi daerah yang tepat merupakan jalan terbaik, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut pembangunan tidak akan berjalan dengan efektif. Akan tetapi hal ini tergantung pada masing-masing daerah, dikarenakan antar daerah mempunyai sektor-sektor unggulan atau sektor basis yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul "*Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten Kupang*".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah penelitian adalah:

1. Apa saja sektor unggulan dalam prioritaskan pembangunan Ekonomi daerah Kabupaten Kupang?
2. Apakah ada pengaruh sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kupang?

3. Bagaimana strategi pembangunan Kabupaten Kupang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui sektor unggulan Kabupaten Kupang dalam prioritas pembangunan Ekonomi Daerah
2. Mengetahui pengaruh sektor unggulan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Kupang.
3. Mengetahui strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Kupang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kupang. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Pemerintah

Bahan masukan bagi Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menentukan arah dan prioritas kebijakan pembangunan Ekonomi Daerah.

2. Bagi Peneliti

Bagi penulis sendiri, memperoleh kesempatan untuk mencoba menganalisis secara praktis dan sistematis, serta mencoba memecahkan berbagai masalah di lapangan sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimiliki penulis yang

diperoleh semasa mengikuti proses perkuliahan.

3. Bagi Mahasiswa

Bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa yang lain untuk penelitian selanjutnya dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.